

Antagonisasi Gerwani dan Ibuisme Negara: Strategi Rezim Orde Baru Membentuk Ingatan Kolektif dan Hegemoni Gender

The Antagonization of Gerwani and State Ibuism: The New Order's Strategy of Shaping Collective Memory and Gender Hegemony

Aulia Rafika Husna & Anjanie Ardhana Adiyuka

Universitas Gadjah Mada, Sleman, Indonesia

auliarafikahusna28@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 21 Juli 2025, direvisi 21 September 2025, diputuskan diterima 28 September 2025

Abstract

This paper explores how the New Order regime used the antagonization of Gerwani and the institutionalization of state ibuism as ideological strategies to shape collective memory and maintain the hegemony of gender power. Gerwani as a symbol of progressive women's movement was erased from history through narratives of moral depravity and political threat. At the same time, the concept of state ibuism is institutionalized through organizations, such as Dharma Wanita and PKK with its inherent doctrine of subordination. This paper uses the process tracing method to trace the relationship between political repression, the formation of gender narratives, and the framing of women's roles in the New Order social order. The results of the analysis show that the strategy was not only successful in suppressing critical women's movements, but also in creating gender constructions in social memory and institutional structures in Indonesia.

Keywords: Gerwani, state ibuism, women's organizations

Abstrak

Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana rezim Orde Baru menggunakan antagonisasi terhadap Gerwani dan institusionalisasi ibuisme negara sebagai strategi ideologis untuk membentuk ingatan kolektif serta mempertahankan hegemoni kekuasaan gender. Gerwani sebagai simbol gerakan perempuan progresif dihapus dari sejarah melalui narasi kejahatan moral dan ancaman politik. Bersamaan dengan itu, konsep ibuisme negara dilembagakan melalui organisasi, seperti Dharma Wanita dan PKK dengan doktrin subordinasi yang melekat. Tulisan ini menggunakan metode *process tracing* untuk menelusuri hubungan antara represi politik, pembentukan narasi gender, dan pembungkaman peran perempuan dalam tatanan sosial Orde Baru. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi tersebut tidak banyak berhasil meredam gerakan perempuan yang bersifat kritis, tetapi juga menciptakan konstruksi gender dalam memori sosial dan struktur institusional di Indonesia.

Kata kunci: Gerwani, ibuisme negara, organisasi perempuan

Pendahuluan

Di akhir era Soeharto, peran perempuan dalam gerakan demokrasi menjadi lebih terlihat dengan hadirnya organisasi seperti Suara Ibu Peduli yang secara aktif memprotes rezim. Aksi ini menjadi salah satu momen integral yang menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya korban dalam krisis, tetapi juga aktor penting dalam perjuangan demokratisasi Indonesia. Berbagai aktivisme dan organisasi perempuan kemudian terus meningkat, mulai dari pendirian Komnas Perempuan, pembentukan berbagai yayasan bagi perempuan, hingga kampanye-kampanye nirkekerasan terkait perjuangan hak perempuan lainnya. Seiring berjalannya era reformasi, keterlibatan perempuan di berbagai lini kehidupan masyarakat

terus meningkat. Meskipun menghadapi hambatan signifikan akibat norma-norma patriarki yang mengakar di masyarakat serta ketidaksetaraan gender, para perempuan Indonesia terus bertarung untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan sepenuhnya dihormati dan ditegakkan di semua sektor masyarakat. Oleh karena itu, era Reformasi selalu dianggap sebagai titik balik bagi organisasi perempuan di Indonesia.

Namun, terlepas dari keterbukaan politik era Reformasi, perempuan Indonesia terus menghadapi tantangan yang signifikan dalam mencapai kesetaraan dan representasi penuh. Ketidaksetaraan akses di berbagai aspek masih sering ditemui. Keterbatasan representasi yang bermakna di pemerintahan semakin membesar gap antar gender di dalam proses pembuatan

kebijakan. Bahkan, perempuan di kursi pemerintahan sering kali mengalami kekerasan psikologis dan intimidasi dalam mendorong agenda politik perempuan di parlemen (Pratiwi 2019). Hal tersebut membuat berbagai kebijakan sering kali meminggirkan kebutuhan perempuan. Padahal, dilansir dari data Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah perempuan di Indonesia mencapai lebih dari 137 juta jiwa atau sekitar 49 persen dari jumlah populasi keseluruhan. Angka tersebut tentunya menunjukkan besaran komposisi yang tidak jauh berbeda dari jumlah populasi laki-laki. Akan tetapi, signifikansi dari perempuan sebagai agen aktif dalam ruang politik, utamanya dalam pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan masih dikesampingkan. Hal ini menggarisbawahi kesenjangan antara perubahan demokratis formal dan realitas hidup banyak perempuan di Indonesia. Ketimpangan representasi perempuan di ranah politik tidak hanya mencerminkan ketidakadilan struktural, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika perspektif perempuan dikesampingkan, kebijakan yang dihasilkan berisiko gagal menjawab persoalan nyata yang harus dihadapi.

Tidak hanya itu, perempuan masih mengalami kekerasan berbasis gender yang masif. Sayangnya, perlindungan hukum terhadap perempuan masih sangat lemah. Banyak kasus kekerasan tidak ditangani secara serius, baik karena minimnya aparat penegak hukum, terbatasnya akses terhadap layanan pendampingan dan keadilan, maupun budaya menyalahkan korban yang masih kuat mengakar di masyarakat. Undang-undang yang ada sering kali belum mampu memberikan perlindungan komprehensif dan berpihak pada korban, bahkan beberapa celah hukum justru mempersulit proses pelaporan dan penanganan kasus. Beberapa organisasi perempuan yang berafiliasi dengan negara, seperti Dharma Wanita dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), justru masih terus mempromosikan peran gender tradisional dengan fokus pada tanggung jawab domestik daripada aktivisme politik. Berangkat dari problematika di atas, kami berusaha menjawab sebuah pertanyaan terkait bagaimana ingatan kolektif terhadap organisasi perempuan di Indonesia dibentuk dan dipertahankan sebagai instrumen politik bagi kepentingan rezim yang berkuasa?

Eksplorasi untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas akan dibangun dari konsep *Politics of Naming* yang muncul dalam diskursus terkait Genosida oleh Mamdani (2009) Konsep *Politics of Naming* berkaitan dengan proses produksi sebuah label yang sangat

dipengaruhi oleh struktur kekuasaan. Pelabelan ini bukanlah deskripsi yang netral tetapi sesuatu yang telah dipertimbangkan secara politik dan merupakan konsekuensi dari berlakunya sebuah struktur kekuasaan. *Politics of Naming* diimplementasikan untuk melayani kepentingan politik, mendistorsi pemahaman, atau membentuk suatu narasi yang sesuai dengan struktur kekuasaan yang sedang berlaku. Hasil dari *Politics of Naming* akan menentukan bagaimana suatu konflik akan dipahami secara luas.

Selain konsep *Politics of Naming*, tulisan ini juga akan mengeksplorasi penelitian melalui identifikasi konsep ibuisme negara. Suryakusuma (2011) mendefinisikan ibuisme negara sebagai ideologi gender yang mengarah pada proses ‘domestifikasi’ perempuan bidang ekonomi, politik, ideologi, dan budaya. Melalui ideologi Ibuisme Negara, gagasan tentang perempuan ideal diperjelas dalam batas-batas identitas perempuan sebagai istri, ibu, dan warga negara yang membatasi mereka di ranah domestik dan memisahkan mereka dari laki-laki. Hingga saat ini, terminologi “Ibu” telah menjadi identitas yang statis dan tunggal yang menyeragamkan realitas perempuan Indonesia yang kompleks di berbagai kategori etnis, agama, dan sosial ekonomi (Hyunanda et al. 2021). Ideologi Ibuisme Negara bertanggung jawab dalam membentuk identitas homogen bagi perempuan Indonesia yang berpusat pada definisi “Ibu” secara gender. Menurut Djajadiningrat (1997), terminologi “Ibu” dalam konsep ibuisme negara juga merujuk pada semua perempuan yang sudah menikah atau dalam usia subur yang mengimplikasikan bahwa semua perempuan akan menjadi ibu. Sebagai seorang Ibu, perempuan memainkan peran penting dalam pengelolaan rumah tangga dan bertanggung jawab atas kebutuhan fisik dan emosional anggota keluarganya, termasuk mengasuh dan mensosialisasikan anak-anak mereka sehingga mereka menunjukkan rasa hormat dan kesopanan (Hyunanda et al. 2021). Menurut prinsip ibuisme negara, perempuan yang menjalankan tugas di dalam keluarganya juga menjalankan tugas untuk negara dalam bentuk yang terkendali sebagai pendukung politik pasif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *process tracing* untuk menelusuri hubungan antara penyebab yang mungkin terjadi dan hasil yang diamati (George & Bennett 2005). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. *Process tracing* dapat secara

induktif mengungkap keterkaitan antar kasus yang dapat menciptakan hubungan antar peristiwa sehingga memberikan wawasan lebih dalam tentang dinamika organisasi perempuan di Indonesia. Dengan demikian, metode ini menjadi alat yang kuat dalam mengeksplorasi bagaimana narasi antagonistik terhadap Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dibentuk dan dimanfaatkan oleh rezim untuk melegitimasi penghapusan gerakan perempuan progresif. Lebih lanjut, penelitian ini juga menelusuri bagaimana antagonisme tersebut menjadi bagian dari strategi ideologis negara dalam mengimplementasikan ibuisme negara sebagai norma dominan bagi perempuan, melalui PKK dan Dharma Wanita. Dengan menelusuri proses pembungkaman ulang peran perempuan dari aktor politik aktif menjadi simbol domestik ideal, *process tracing* memungkinkan penelusuran terhadap interaksi antara wacana politik, kebijakan negara, dan aparatus kekuasaan yang membentuk konstruksi gender. Melalui metode *process tracing*, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih dalam bagaimana represi terhadap Gerwani tidak hanya bersifat fisik dan politis, tetapi juga epistemik melalui pengendalian narasi sejarah dan ideologi gender negara.

Argumen utama penelitian ini adalah bahwa ingatan kolektif terhadap organisasi perempuan di Indonesia sebelum reformasi dibentuk dan dipertahankan oleh rezim yang berkuasa melalui antagonisasi Gerwani dan institusionalisasi konsep ibuisme negara. Kedua hal tersebut dimanipulasi sebagai alat politik untuk menanggulangi hegemoni gender dan ideologi tertentu, khususnya pada masa Orde Baru. Antagonisasi dilakukan secara sistematis oleh rezim Orde Baru untuk menghapus jejak historis gerakan perempuan yang progresif. Melalui propaganda negara, Gerwani diposisikan sebagai simbol kejahatan moral dan ancaman terhadap tatanan sosial. Stigmatisasi ini mendelegitimasi segala bentuk aktivisme perempuan yang bersifat politik dan membungkam potensi kolektif perempuan sebagai agen perubahan sosial. Sementara itu, institusionalisasi konsep ibuisme negara diterapkan melalui pembentukan dan penguatan organisasi, seperti Dharma Wanita dan PKK. Organisasi-organisasi tersebut tidak hanya mengarahkan perempuan pada peran domestik sebagai ibu dan istri pendukung suami, tetapi juga menjadikan peran tersebut sebagai satu-satunya bentuk pengabdian yang diakui negara. Dengan demikian, negara membingkai peran perempuan dalam kerangka pelayanan terhadap keluarga dan negara secara hierarkis, sembari menyingkirkan ruang partisipasi perempuan dalam ranah politik dan publik.

Dalam konteks ini, antagonisme dan ibuisme berjalan beriringan sebagai perangkat ideologis untuk membatasi agensi perempuan dan mereproduksi struktur patriarki yang sesuai dengan kepentingan rezim. Eksplorasi terkait kausalitas antagonisasi Gerwani dan implementasi ibuisme ini dapat menunjukkan kontribusi negara dalam membentuk ingatan dan pemahaman kolektif tentang peran perempuan di Indonesia. Rekonstruksi negara tersebut kemudian membentuk hegemoni pengetahuan yang memaksa organisasi perempuan pasca-Gerwani untuk tumbuh dan beroperasi secara memusat, alih-alih mengimplementasikan desentralisasi serta mengarah pada akar rumput. Oleh karena itu, tulisan ini merupakan bagian dari pembangunan kontra narasi sekaligus upaya merebut kembali ingatan atas sejarah perempuan.

Sejarah dan Ideologi Gerwani

Perjuangan perempuan Indonesia dalam sejarah tidak pernah terlepas dari dinamika politik yang mewarnai perjalanan bangsa. Salah satu organisasi perempuan paling menonjol dalam sejarah Indonesia modern adalah Gerakan Wanita Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Gerwani. Didirikan pada awal era pascakemerdekaan, Gerwani mengalami perkembangan ideologi yang kompleks dan dinamis—dari gerakan yang berfokus pada emansipasi dan pendidikan perempuan, hingga menjadi organisasi yang mengadopsi ideologi revolusioner kelas proletar. Perjalanan ini tidak hanya mencerminkan transformasi internal Gerwani, tetapi juga menyingkap bagaimana struktur kekuasaan, ideologi negara, dan gerakan sosial saling berkelindan dalam membentuk pengalaman politik perempuan Indonesia.

Fase Awal: Emansipasi dan Nasionalisme Progresif (1950–1954)

Gerwani didirikan pada 4 Juni 1950 di Semarang dengan nama awal Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) oleh S. K. Trimurti dan beberapa aktivis perempuan yang bertempur di agresi militer Belanda II. Organisasi ini lahir dari semangat perempuan-perempuan muda yang telah terlibat dalam perjuangan fisik kemerdekaan Indonesia. Pada awal pembentukannya, keanggotaan Gerwis hanya mencapai lima ratus orang yang sebagian besar terdiri dari para perempuan berpendidikan, kelas menengah, dan sadar secara politis. Gerwis dibentuk untuk mencapai masyarakat yang bebas dari perbudakan dan penindasan, antara orang-orang, kelompok, serta

negara berbeda (Fanani 2024). Gerwis mulai meluaskan pergerakannya di antara massa perempuan Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Pola perekrutan anggota Gerwani sangat terbuka, organisasi perempuan ini menerima semua kaum perempuan dari berbagai golongan apa pun dengan minimal usia 16 tahun atau yang sudah menikah (Rahmanudin 2022). Pada tahun 1953, keanggotaan Gerwis mencapai empat puluh ribu orang yang menandai perkembangan pesatnya hanya dalam selang waktu tiga tahun sejak didirikan. Fokus pergerakan organisasi juga mulai meluas seiring berjalannya waktu. Gerwis mulai menjangkau ranah yang lebih luas dengan tujuan utama untuk mengangkat derajat perempuan Indonesia melalui pendidikan, peningkatan kesadaran politik, dan pemberdayaan ekonomi. Berbagai pergerakan diinisiasi mulai dari pembentukan panti penitipan anak, pelaksanaan kursus melek huruf, hingga penyelenggaraan beragam kegiatan pembangkit pendapatan. Dalam konteks ideologis, fase ini ditandai dengan semangat nasionalisme progresif dan feminis emansipatoris. Gerwis berusaha menciptakan kesadaran kritis di kalangan perempuan atas hak-hak mereka sebagai warga negara dalam republik yang baru berdiri. Gerwis adalah bentuk perlawanan strategis di tengah masyarakat dan struktur kekuasaan yang patriarkis.

Agenda utama Gerwis mencakup penghapusan buta huruf, penguatan peran perempuan dalam pembangunan, dan advokasi hak-hak buruh perempuan. Meskipun pada tahap ini organisasi belum secara terbuka berafiliasi dengan partai politik mana pun, orientasi kelas mulai tampak dari fokus mereka pada perempuan pekerja dan petani. Hal ini berbeda dengan organisasi perempuan borjuis pada masa itu yang lebih menekankan pada kesetaraan dalam kerangka hukum dan keluarga, sementara Gerwis justru membawa isu-isu struktural seperti eksploitasi tenaga kerja dan kemiskinan.

Transformasi Menjadi Gerwani, Pendekatan Kelas, dan Pergerakan Strategis (1954–1959)

Pada tahun 1954, keanggotaan Gerwis mencapai dua kali lipat dari tahun sebelumnya yakni mencapai delapan puluh ribu orang. Peningkatan pesat tersebut juga mengarah pada perubahan haluan Gerwis secara keseluruhan. Pada Kongres Nasional I di Jakarta tahun 1954, diputuskan bahwa organisasi itu akan menghilangkan unsur “sektarianisme” dan beralih untuk membangun pangkalan massa (Wieringa 1993).

Untuk melambangkan perubahan besar ini, kata “sedar” dihilangkan dan kemudian diubah menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Transformasi nama Gerwis menjadi Gerwani merupakan titik balik ideologis. Gerwani mulai mempererat hubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengadopsi analisis kelas dalam perjuangan mereka. Meskipun tidak secara formal menjadi sayap perempuan PKI, hubungan ideologis dan struktural antara keduanya sangat erat. Sejak saat itu, Gerwani dapat dikategorikan sebagai organisasi perempuan berhaluan Marxis-Leninis yang meyakini bahwa pembebasan perempuan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan kelas melawan kapitalisme dan feodalisme.

Pada tahun 1955, Gerwani berkembang jauh lebih pesat dengan keanggotaan yang mencapai empat ratus ribu orang. Sebagian besar anggota Gerwani kala itu adalah para petani perempuan yang tidak berpendidikan. Demografi organisasi mengalami perubahan yang signifikan, yang sebelumnya—saat masih menjadi Gerwis—keanggotaan didominasi oleh para perempuan berpendidikan dari kelas menengah. Perubahan signifikan ini membawa Gerwani pada perluasan pergerakan dan perjuangan. Gerwani mengembangkan ide bahwa penindasan terhadap perempuan bukan hanya akibat sistem patriarki, tetapi juga akibat dari struktur ekonomi-politik yang menindas rakyat secara keseluruhan. Dalam pemikiran ini, perempuan petani dan buruh mengalami penindasan ganda: sebagai kelas yang tertindas dalam sistem ekonomi dan sebagai gender yang terpinggirkan dalam sistem sosial patriarkal. Oleh karena itu, perjuangan pembebasan perempuan bagi Gerwani adalah perjuangan menyeluruh yang menuntut perubahan struktural.

Gerwani menginisiasi pengembangan dan perjuangan hak yang lebih luas. Gerwani mulai fokus pada permasalahan kekerasan seksual serta memperjuangkan hukum perkawinan yang lebih demokratis (Fanani 2024). Gerwani juga menolak feminisme borjuis Barat yang dianggap elitis dan tidak menyentuh akar persoalan mayoritas perempuan di Indonesia. Bagi Gerwani, perjuangan perempuan tidak semata-mata tentang persamaan hak dalam hukum atau pendidikan, tetapi juga tentang hak atas tanah, upah layak, dan perlindungan sosial. Dalam kerangka inilah, Gerwani membangun pendidikan politik untuk perempuan, mengadvokasi reforma agraria, serta mendukung kebijakan-kebijakan yang dianggap berpihak pada rakyat.

Dengan berbagai perkembangan internal, Gerwani menunjukkan pergerakan eksternal yang lebih signifikan. Gerwani mulai aktif terlibat dalam pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan tahun 1955. Gerwani menunjukkan dukungannya terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) atas persamaan ide untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan emansipasi wanita. Dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh anggota Gerwani tercatat aktif terlibat dalam kampanye Pemilu 1955. Hal tersebut berhasil membuat PKI memperoleh banyak suara dari massa perempuan dan menempati peringkat keempat dalam pemilihan. Selanjutnya, enam anggota Gerwani terpilih menjadi anggota parlemen yang mewakili PKI. Manuver politik Gerwani mulai terlihat jelas melalui berbagai aktivitas lobi yang dilakukan kepada para petinggi partai. Pendekatan strategis ini berhasil mengikat PKI untuk mendukung dua dari berbagai agenda feminis Gerwani, yakni dukungan partai terhadap tuntutan undang-undang perkawinan baru dan perizinan keikutsertaan perempuan dalam pemilihan kepala desa. Pergerakan ini menandai transformasi integral terhadap gagasan yang telah mengakar di masyarakat bahwa perempuan harus tunduk dan patuh.

Keterlibatan Aktif dan Radikalisasi (1960–1965)

Memasuki dekade 1960-an, posisi politik Gerwani semakin kuat seiring menguatnya PKI sebagai partai massa. Gerwani secara terbuka mendukung program “Revolusi Nasional Demokratik” yang didorong oleh PKI dan Presiden Soekarno. Pada masa ini, Gerwani mulai memobilisasi perempuan untuk ikut serta dalam perjuangan politik yang lebih aktif, termasuk pelatihan-pelatihan paramiliter, kampanye anti-imperialisme, dan demonstrasi melawan kekuatan konservatif dalam negara.

Radikalisasi ideologi Gerwani juga tampak dalam keberaniannya mengkritik institusi-institusi negara yang dianggap tidak adil atau bersifat feodal dan patriarkal. Salah satu agenda penting Gerwani adalah menuntut agar perempuan memiliki hak yang setara dalam kehidupan politik dan ekonomi, termasuk dalam reformasi agraria, pendidikan, dan perlindungan hukum. Mereka juga menuntut agar kekerasan terhadap perempuan—baik dalam rumah tangga maupun dalam institusi negara—diakui sebagai persoalan serius yang harus ditangani secara struktural.

Dalam pidato-pidato dan publikasi Gerwani, terminologi ideologis, seperti “feodalisme”,

“imperialisme”, dan “kapitalisme monopoli” menjadi bahasa utama. Gerwani memandang bahwa sistem ekonomi-politik global yang tidak adil—yang didominasi oleh negara-negara Barat dan kelas penguasa dalam negeri—merupakan akar dari penderitaan rakyat, termasuk perempuan. Oleh karena itu, perempuan harus terlibat langsung dalam perjuangan revolusi rakyat.

Sebenarnya, relasi antara Gerwani dan PKI cukup rumit. Gerwani mendukung sebagian besar kampanye nasional PKI, seperti kampanye pembebasan Irian Jaya dari Belanda dan kampanye Soekarno untuk mengacaukan negara bagian Malaysia yang baru di awal tahun 1960-an. Akan tetapi, Gerwani tidak serta-merta mendukung PKI secara keseluruhan. Meskipun berhasil mengikat PKI untuk mendukung dua agenda feminis Gerwani, PKI tidak secara eksplisit memperhatikan masalah perempuan. PKI masih melihat peran perempuan sebagai perluasan dari tugas-tugas domestik mereka, alih-alih melihatnya sebagai pergerakan strategis yang utuh. Bagi PKI, seluruh permasalahan yang dihadapi perempuan akan terpecahkan ketika aspek kolonial, imperialis, dan feodal masyarakat Indonesia telah disingkirkan (Wieringa 1993). Hal ini tentunya tidak sejalan dengan arah pergerakan Gerwani yang menginginkan perubahan revolusioner segera. Meskipun PKI mengakui persoalan beban ganda yang dihadapi oleh para perempuan, mereka melihat persoalan tersebut sebagai persoalan masa depan yang sama dan jauh. PKI tidak menyadari bahwa itu menjadi signifikan dalam menghambat para perempuan untuk bergerak.

Kegagalan PKI dalam mengakomodasi persoalan perempuan menunjukkan bagaimana tatanan kekuasaan yang masih sangat patriarkis. Meskipun demikian, Gerwani tetap menginisiasi pergerakannya secara luas dan strategis. Gerwani menekankan bahwa perempuan adalah orang yang mandiri dan aktif secara sosial, baik di bidang ekonomi maupun politik. Gerwani juga secara aktif memandang aspek keluarga sebagai bagian dari perubahan progresif. Gerwani menekankan bahwa hubungan antara istri dan suami harus dicirikan oleh rasa saling menghormati dan kesetaraan, bukan oleh subordinasi.

Pada awal tahun 1960-an, Gerwani mengembangkan berbagai kegiatan secara luas, mulai kelompok kredit, taman kanak-kanak, koperasi konsumen, kursus literasi, pendampingan bagi perempuan yang bermasalah dengan perkawinan, kursus kerajinan tangan, kampanye

untuk menurunkan harga bahan makanan pokok, serta bantuan kepada PKI dan organisasi massa kiri lainnya (Wieringa 1993). Di tingkat nasional, Gerwani mendukung seruan Soekarno dan para penulis sosialis lainnya untuk revolusi berkelanjutan. Gerwani juga melatih para perempuan untuk menjadi sukarelawan dalam kampanye anti-Malaysia. Dalam menerjemahkan kebijakan nasional, Gerwani menjalankan peran mediasi dua arah. Gerwani mengimplementasikan kebijakan nasional yang dianggap sesuai dan sejalan ke dalam program di tingkat lokal. Di sisi lain, Gerwani menerjemahkan tuntutan dan persoalan perempuan di tingkat lokal kepada pemerintah. Di tingkat lokal, anggota Gerwani juga memobilisasi demonstrasi massa untuk menentang penangkapan para pemimpin petani atau buruh. Cabang-cabang Gerwani juga aktif bekerja sama dengan cabang lokal perempuan lainnya untuk menanggulangi persoalan pekerja sosial, bantuan banjir, hingga bantuan untuk para korban prostitusi paksa. Berbagai pergerakan strategis ini dilakukan untuk menarik perhatian semua sektor perempuan di Indonesia—baik di pedesaan maupun perkotaan—serta membuat mereka sadar akan faktor-faktor yang mendasari penindasan yang mereka hadapi. Gerwani berjuang untuk mentransformasi masyarakat secara berkelanjutan sehingga perempuan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih aktif dan vokal.

Dalam krisis politik dan ekonomi yang berkembang di Indonesia kala itu, Gerwani menghadapi tekanan, baik internal maupun eksternal untuk berafiliasi secara resmi dengan PKI. Oleh karena itu, pada Kongres Kelima pada tahun 1964, Gerwani memutuskan untuk bergabung dengan PKI. Keputusan itu menyebabkan konflik internal di dalam Gerwani. Perubahan ini menyebabkan pendiri Gerwani, Trimurti, meninggalkan gerakan pada tahun 1965. Namun, posisi politik Gerwani yang semakin radikal juga menimbulkan resistensi dari kelompok militer, agamawan konservatif, dan elite politik lainnya. Ketegangan ini memuncak menjelang peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Setelah peristiwa G30S 1965, Gerwani menjadi korban dari kampanye hitam yang sistematis. Melalui media massa dan propaganda militer, Gerwani difitnah terlibat dalam penyiksaan dan pembunuhan para jenderal TNI di Lubang Buaya. Fitnah tersebut digunakan untuk membungkam gerakan perempuan progresif dan membersihkan arena politik dari pengaruh kiri. Narasi ini kemudian digunakan untuk membenarkan pembubaran organisasi dan penangkapan massal terhadap anggota serta simpatisan Gerwani. Dalam

waktu singkat, Gerwani—organisasi perempuan terbesar di Indonesia dengan lebih dari 1,5 juta anggota—dibubarkan dan sejarah perjuangannya dihapus dari narasi resmi negara selama puluhan tahun.

Antagonisasi Gerwani

Pada tanggal 30 September 1965 dini hari, para perempuan relawan diseret oleh tentara pemberontak ke sebuah lapangan, yaitu Pemuda Rakyat—Organisasi Pemuda PKI—dan Gerwani dilatih untuk kampanye anti-Malaysia (Wieringa 1993). Para perempuan tersebut dipaksa menyaksikan pembunuhan sadis terhadap para Perwira Angkatan Darat di tempat yang sekarang disebut dengan Lubang Buaya. Mereka dipaksa untuk menyaksikan berbagai pembunuhan tersebut sebelum akhirnya diizinkan untuk melarikan diri. Keesokan harinya, 1 Oktober 1965, tanpa sepengetahuan para perempuan tersebut, media yang dikendalikan oleh angkatan darat mulai menyebarkan kampanye fitnah seksual terhadap Gerwani. Berbagai surat kabar—Surat kabar Harian ABRI, Berita Yudha, Kompas—dan radio nasional mulai menerbitkan informasi palsu dan menuduh bahwa perempuan komunis Gerwani menyiksa tujuh perwira senior tentara di Lubang Buaya, termasuk enam jenderal. Tuduhan tersebut bergerak lebih jauh melalui fitnah bahwa anggota Gerwani menikam para perwira tentara dengan pisau dan memotong alat kelamin atau bahkan mencungkil mata mereka. Mereka pun dituduh melakukan tarian telanjang yang menggoda bernama Tarian Bunga Harum sebagai ritual (Fanani 2024).

Selain penyebaran berita palsu, para tentara juga membuat beberapa saksi palsu dengan menangkap dan menyiksa beberapa pelacur di daerah Lubang Buaya. Mereka kemudian dipaksa untuk mengaku sebagai anggota Gerwani dan membuat pernyataan palsu kepada publik serta diadili atas insiden Lubang Buaya (Fanani 2024). Wieringa (2002) menemukan bahwa foto-foto yang dijadikan sebagai bukti palsu Tarian Bunga Harum adalah foto yang diambil dari para perempuan relawan yang dipaksa untuk membuka pakaian di penjara dan menari telanjang di depan para penyiksanya. Di samping itu, tentara di bawah Jenderal Soeharto juga menyembunyikan laporan medis bahwa tidak ditemukan sayatan pisau atau silet di tubuh para jenderal yang terbunuh (Wieringa 1993). Kampanye hitam tersebut terhadap Gerwani terus dipublikasikan di surat kabar selama bulan Oktober hingga Desember 1965. Beredar pula klaim bahwa Aidit—ketua PKI kala itu—melatih ratusan anggota

Gerwani untuk melayani dirinya dan para pemimpin partai laki-laki lainnya dalam konteks seksual (Wieringa 1993). Akibat dari berbagai kampanye hitam tersebut, Gerwani mengalami stigmatisasi dan menjadi kambing hitam politik. Gerwani dikeluarkan dari Kongres Wanita Indonesia (Kowani) pada Oktober 1965 atas tuntutan Muslimat Nahdhatul Ulama dan Kelompok Perempuan Katolik. Puncaknya, Gerwani dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah Orde Baru tak lama setelahnya.

Pascaperistiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S), Gerwani menjadi sasaran utama kampanye propaganda Orde Baru. Melalui media dan film seperti Pengkhianatan G30S/PKI, Gerwani digambarkan sebagai organisasi perempuan yang kejam, tidak bermoral, dan terlibat dalam penyiksaan serta pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya. Narasi ini tidak hanya mendiskreditkan Gerwani, tetapi juga membentuk persepsi publik yang negatif terhadap organisasi ini. Representasi yang menekankan unsur seksualisasi kekerasan—seperti tuduhan menari telanjang di sekitar jenazah dan memutilasi alat kelamin para jenderal—dibentuk untuk menanamkan rasa jijik, takut, dan benci terhadap Gerwani, serta memperkuat anggapan bahwa perempuan yang aktif secara politik adalah ancaman bagi tatanan sosial patriarkal. Strategi ini sangat efektif karena tidak hanya mendelegitimasi Gerwani sebagai aktor politik, tetapi juga membungkam gerakan perempuan progresif secara umum. Dengan menciptakan asosiasi kuat antara Gerwani, komunisme, dan kejahatan seksual, negara berhasil membekukan ruang gerak perempuan dalam ranah politik dan publik untuk waktu yang sangat lama.

Setelah beberapa dekade, sisi lain tentang apa yang terjadi pada 30 September 1965 mulai muncul ke permukaan. Pada pertengahan tahun 1980, Wieringa (2001) mewawancarai beberapa pemimpin Gerwani yang masih hidup dan baru saja dibebaskan dari penjara, serta beberapa anggota yang pernah terlibat dalam peristiwa-peristiwa di sekitar Lubang Buaya. Salah satu relawan perempuan yang pernah hadir di Lubang Buaya mengenang peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 dan menyatakan:

“Saya berusia enam belas tahun dan menjadi anggota Pemuda Rakyat [organisasi pemuda PKI]. Saya telah dilatih di Cipete dan telah mengikuti banyak latihan untuk konfrontasi dengan Malaysia, jadi ketika saya diminta untuk datang ke Lubang Buaya, saya dengan sendirinya ikut. Saya menyaksikan para tentara membunuh para jenderal dan berlari pulang ke rumah setelahnya. Saya ditangkap pada pukul sembilan pagi dan dimasukkan ke dalam penjara selama dua minggu. Saya dipukuli dan diinterogasi. Mereka

memaksa kami untuk menanggalkan pakaian dan menari telanjang di depan mereka sementara mereka mengambil gambar. Kemudian saya dibebaskan. Setelah beberapa saat saya ditangkap lagi dan dibebaskan lagi. Total saya ditangkap lima kali sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk menahan saya di penjara.”

Menurut laporan International People’s Tribunal (2016), Komnas Perempuan menyatakan bahwa anggota organisasi perempuan komunis Gerwani dan perempuan lain yang diduga berafiliasi dengan PKI menjadi target pembunuhan sistematis, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kekerasan seksual. Komnas Perempuan percaya bahwa Gerwani adalah target dari “kampanye hitam yang dirancang untuk menghancurkan kelompok politik ini secara total” (Komnas Perempuan 2007). Sayangnya, kampanye hitam terhadap keterlibatan dan kekejaman Gerwani dalam insiden Lubang Buaya justru dipercaya secara luas. Diperkirakan sekitar ratusan ribu hingga satu juta orang yang tidak bersalah menjadi korban pembantaian dan pemenjaraan (Pohan 2020). Stigmatisasi buruk terhadap Gerwani terus menyebar luas ke setiap penjuru wilayah di Indonesia. Selain stigmatisasi, Orde Baru juga melakukan upaya sistematis untuk menghapus sejarah Gerwani dari ingatan kolektif bangsa melalui apa yang disebut Soeharto sebagai “transisi mental”.

Pemerintah Orde Baru secara lebih lanjut melanggengkan fitnah seksual dari peristiwa Lubang Buaya melalui pembangunan monumen Pancasila Sakti. Relief pada monumen tersebut menggambarkan para perempuan menari telanjang sementara PKI membunuh para jenderal dan membuang tubuh mereka ke dalam lubang. Di sisi lain, melalui kurikulum pendidikan, media, dan kontrol informasi, narasi tentang Gerwani direduksi menjadi cerita pengkhianatan tanpa menyentuh kontribusi organisasi ini dalam perjuangan kemerdekaan dan pemberdayaan perempuan. Upaya penghapusan ini berdampak pada generasi muda yang tumbuh tanpa mengetahui sejarah lengkap Gerwani. Nama Gerwani menjadi tabu dan pembicaraan tentang organisasi ini sering kali dihindari karena takut dianggap simpatisan komunis. Dalam konteks ini, kekuasaan Orde Baru tidak hanya membentuk ingatan kolektif melalui narasi tunggal, tetapi juga menciptakan kekosongan sejarah yang disengaja—sebuah ruang hampa dalam memori nasional yang membuat gerakan perempuan radikal seperti Gerwani tampak tidak pernah ada. Penghapusan ini memperkuat dominasi ideologi patriarki dan anti komunis yang tidak memberi ruang bagi keberagaman

narasi sejarah. Akibatnya, perjuangan perempuan Indonesia yang bercorak kelas dan politik di masa lalu terpinggirkan, digantikan oleh representasi pasif tentang perempuan yang hanya berperan dalam ruang domestik atau sebatas pendukung negara. Strategi penghapusan ini menunjukkan betapa kuasanya politik ingatan (*politics of memory*) sebagai kelanjutan dari politik penamaan—keduanya bekerja untuk membatasi wacana, mengontrol pengetahuan, dan mereproduksi ketakutan yang berakar panjang.

Sangat mungkin bahwa Gerwani dipilih sebagai gudang ideologis perlawanan terhadap tatanan jantan militer dan kekuatan konservatif dalam masyarakat karena desakannya terhadap aktivisme politik perempuan dianggap sebagai bentuk pemberontakan yang tidak dapat diterima (Wieringa 2001). Dalam konteks negara pascakolonial yang sedang membangun identitas nasionalnya, partisipasi perempuan yang melampaui ranah domestik dipandang mengancam struktur kekuasaan patriarki yang telah mapan. Gerwani, dengan keterlibatannya dalam gerakan kiri dan dukungannya terhadap isu-isu, seperti reformasi agraria, kesetaraan gender, serta hak-hak buruh perempuan, mencerminkan suatu bentuk politik yang tidak hanya progresif tetapi juga radikal bagi standar konservatif pada masa itu. Oleh karena itu, organisasi ini menjadi sasaran delegitimasi dan demonisasi guna menyingkirkan segala bentuk perlawanan terhadap hegemoni negara Orde Baru yang maskulin dan otoriter.

Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) menjadi contoh nyata bagaimana praktik penamaan digunakan untuk membentuk, mengubah, dan menghapus identitas kolektif. Dalam konteks politik penamaan, Gerwani mengalami proses penamaan ulang yang bersifat stigmatis. Nama Gerwani yang sebelumnya identik dengan perjuangan perempuan dan keadilan sosial, diubah maknanya menjadi simbol pengkhianatan dan kekejaman. Proses ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat menggunakan penamaan untuk mengontrol narasi sejarah dan membentuk opini publik. Dalam hal ini, penamaan tidak bersifat netral, melainkan sarat kepentingan ideologis. Nama menjadi alat negara untuk menetapkan batas antara yang dianggap “nasionalis” dan yang dicap “subversif.” Lewat penamaan ulang ini, Gerwani tidak hanya dijauhkan dari akar historisnya sebagai organisasi perempuan progresif, tetapi juga diposisikan sebagai musuh dalam narasi besar Orde Baru tentang keamanan nasional, stabilitas politik, dan moralitas. Akibatnya, identitas asli Gerwani terkubur di balik citra karikatural yang

direproduksi secara masif melalui media, pendidikan, dan budaya populer.

Apa yang terjadi pada Gerwani mencerminkan bagaimana *politics of naming* tidak hanya menjadi alat pelabelan semata, tetapi juga instrumen hegemoni negara untuk membungkam sejarah alternatif dan mendefinisikan batas-batas kewargaan yang sah. Gerwani tidak hanya mengalami stigmatisasi, tetapi juga menjadi beban sosial dan politik yang diwariskan lintas generasi. Individu-individu yang pernah terlibat atau diasosiasikan dengan Gerwani tak jarang mengalami pengucilan sosial, pelabelan sebagai “komunis,” hingga kehilangan akses terhadap hak-hak sipil. Nama Gerwani menjadi medan konflik simbolik yang memperlihatkan tarik-menarik antara kekuasaan negara dan ingatan kolektif masyarakat. Dalam konteks ini, dapat dilihat bahwa penamaan tidak bersifat netral, melainkan menjadi ladang pertempuran ideologis yang menentukan siapa yang diakui, siapa yang dilupakan, dan siapa yang dilenyapkan dari sejarah nasional.

Ibuisme Negara

Gerwani merupakan organisasi perempuan paling reaksioner dan revolusioner yang berkembang pesat kala itu. Namun, akibat antagonisasi yang masif dan terstruktur, organisasi ini menghadapi kehancurannya. Tidak hanya pembubaran secara resmi, Gerwani menghadapi stigma kekejaman dan kejahatan seksual pascakampanye hitam yang digencarkan di berbagai media massa. Pernyataan Soeharto yang dimuat dalam Berita Yudha 9 November 1965 semakin memperburuk citra Gerwani dengan mengatakan bahwa Gerwani tidak patut ditiru (Lestariningsih & Soekarba 2019). Berbagai mobilisasi kebencian juga terlihat dengan adanya kampanye hitam kepada kelompok komunis, khususnya Gerwani. Namun, keberadaan Gerwani dan berbagai keberhasilannya memobilisasi massa dianggap sebagai ancaman terhadap dominasi sistem patriarki yang mengakar di pemerintahan saat itu. Ketakutan ini diterjemahkan dalam mitos pemotongan penis para jenderal oleh Gerwani. Mitos tersebut kemudian menjadi pilar-pilar ideologis bagi berdirinya kekuasaan Orde Baru sekaligus mesin politik untuk pembersihan terhadap pemikiran sosialis-komunis (Lestariningsih & Soekarba 2019). Budaya patriarki yang telah mengakar menjadi faktor utama propaganda-propaganda Orde Baru terkait Gerwani mudah diterima masyarakat. Kekerasan massal pada tahun 1965—1966 menjadi momok menakutkan bagi para perempuan akibat narasi bahwa perempuan yang

terlibat aktif adalah komunis musuh negara kala itu. Pascapembubaran Gerwani dan naiknya pemerintahan Orde Baru, gerakan perempuan menjadi lumpuh dan disubordinasikan. Organisasi-organisasi perempuan kemudian mengalami delegitimasi dengan direduksi hanya pada kegiatan-kegiatan sosial budaya.

Pascapembubaran Gerwani dan tragedi 1965, gerakan perempuan di Indonesia mengalami transformasi drastis yang ditandai dengan melemahnya aktivisme politik dan menguatnya wacana ibuisme negara. Ibuisme negara merupakan konstruksi ideologis yang memosisikan perempuan terutama sebagai istri dan ibu yang bertugas mendukung pembangunan nasional melalui peran domestik. Dalam kerangka ini, perempuan dipandang bukan sebagai warga negara yang mandiri dan aktif secara politik, melainkan sebagai pelengkap laki-laki dan penjaga moral keluarga. Konsep ini dikembangkan dan dilembagakan secara sistematis oleh rezim Orde Baru melalui berbagai institusi, seperti Dharma Wanita, PKK, dan Bhayangkari yang menanamkan nilai-nilai kepatuhan, kesetiaan, dan pengabdian kepada suami dan negara. Rezim Orde Baru telah membentuk norma baru dalam masyarakat yaitu perempuan hanya dipandang sebagai strata kedua dalam masyarakat. Perempuan tidak lagi diasosiasikan sebagai rekan dalam perjuangan revolusioner, tetapi sebagai istri yang penurut dan ibu yang berbakti (Wieringa 2011).

Di bawah rezim Orde Baru, perempuan tidak lagi diposisikan sebagai subjek politik yang aktif, melainkan dikonstruksikan sebagai penopang stabilitas nasional melalui peran domestik mereka sebagai istri dan ibu. Negara mempromosikan figur "ibu yang baik" (ibu rumah tangga ideal) melalui berbagai organisasi perempuan yang secara sistematis menanamkan nilai-nilai kepatuhan, pengabdian kepada suami, dan keterikatan pada ranah rumah tangga. Transformasi ini menciptakan batasan yang kaku terhadap ekspresi dan partisipasi perempuan dalam ruang publik, sekaligus menormalisasi subordinasi mereka dalam struktur sosial dan politik. Peran perempuan dipersempit menjadi agen moral keluarga yang bertugas melahirkan dan membesarkan generasi penerus bangsa sesuai dengan ideologi pembangunan yang maskulin dan sentralistik. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya dikendalikan secara politik, tetapi juga secara simbolik dijadikan alat legitimasi kekuasaan negara. Identitas dan peran mereka dibentuk berdasarkan kepentingan ideologis rezim, bukan atas dasar kesetaraan atau pilihan bebas.

Melalui ibuisme negara, kekuasaan politik menegaskan kendalinya atas tubuh dan peran sosial perempuan, sambil membungkusnya dalam narasi keserasian gender dan stabilitas nasional. Akibatnya, ruang gerak perempuan dalam politik dan masyarakat dibatasi. Segala bentuk aktivisme perempuan yang menyimpang dari narasi ini dicurigai sebagai ancaman terhadap ketertiban dan moral bangsa. Implementasi ibuisme negara memengaruhi peran perempuan dalam aspek perubahan yang luas. Revolusi Gerwani yang bahkan dapat menjangkau aspek ekonomi seketika runtuh. Organisasi-organisasi perempuan di bawah pemerintah Orde Baru memaksa pergerakan perempuan hanya sebatas upaya formal yang minim terhadap pembangunan nasional. Perempuan tidak lagi menjadi agen pembangunan dan perubahan nasional yang aktif dalam memengaruhi pembentukan kebijakan makro maupun mikro.

Setelah berdirinya Orde Baru rezim pada tahun 1966, ibuisme negara ditransmisikan melalui buku teks pendidikan dan TVRI (Televisi Republik Indonesia) (Kim 2017). Ibuisme negara juga secara konkret diwujudkan melalui institusi-institusi seperti Dharma Wanita dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), yang dibentuk untuk membina dan mengarahkan perempuan sesuai dengan peran domestik yang diidealkan oleh negara. Promosi terkait ibuisme negara dilembagakan dan disebarluaskan secara akar rumput melalui Dharma Wanita yang dibentuk tahun 1974. Dharma Wanita berfungsi sebagai organisasi payung untuk semua organisasi perempuan di kantor-kantor pemerintahan. Dalam Dharma Wanita, yang anggotanya merupakan istri pegawai negeri sipil, perempuan diposisikan sebagai pendukung karier suami dan penjaga citra keluarga yang selaras dengan nilai-nilai kepatuhan, kesetiaan, serta pengabdian. Dharma Wanita juga berkontribusi pada pembangunan ideologi ibuisme negara ke tingkat desa melalui lembaga pemerintahan (Kim 2017). Ideologi tersebut secara eksplisit dicantumkan dalam Panca Dharma Wanita, bahwa perempuan digambarkan sebagai istri pendamping setia suami; ibu pendidik anak dan pembina generasi muda penerus bangsa; pengatur rumah tangga; sebagai pekerja penambah penghasilan keluarga; serta anggota masyarakat yang berguna (Wieringa 2001).

Selain Dharma Wanita, organisasi lain yang didukung langsung oleh pemerintahan Orde Baru untuk menyebarkan ideologi ibuisme negara adalah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pada tahun

1967, istri Gubernur Jawa Tengah memulai penggunaan PKK sebagai bagian dari upaya pembangunan regional. Program ini kemudian diperluas menjadi program nasional di bawah pemerintahan Orde Baru pada tahun 1972 (Kim 2017). PKK berfokus pada pembinaan perempuan di tingkat desa dan kelurahan melalui program-program yang menekankan keterampilan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pengelolaan konsumsi keluarga. Kedua organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai medium internalisasi ideologi ibuisme negara ketika perempuan dinilai berdasarkan kemampuannya mengelola rumah tangga dan mendukung pembangunan dari balik layar. Melalui struktur yang hierarkis dan berbasis pada status suami, Dharma Wanita dan PKK memperkuat narasi bahwa peran utama perempuan adalah sebagai pelengkap laki-laki, bukan sebagai individu yang otonom dan berhak penuh atas ruang publik maupun politik. Pola hierarki yang berbasis pada status suami juga menunjukkan adanya kemunduran pada struktur organisasi-organisasi perempuan. Para pemimpin tidak lagi didasarkan dan diangkat melalui pemilihan yang lebih demokratis.

Orde Baru secara sistematis mengubah sifat organisasi-organisasi perempuan di Indonesia dari yang sebelumnya bersifat politis dan emansipatoris menjadi apolitis dan domestik melalui penerapan ideologi ibuisme negara. Organisasi perempuan yang sebelumnya aktif memperjuangkan hak-hak buruh, kesetaraan gender, dan keadilan sosial—seperti Gerwani—dibubarkan dan digantikan dengan organisasi-organisasi yang diarahkan dan diawasi langsung oleh negara, seperti Dharma Wanita, PKK, dan Bhayangkari. Organisasi-organisasi ini tidak didesain untuk memperkuat posisi tawar perempuan dalam politik atau ekonomi, melainkan untuk mengintegrasikan mereka ke dalam proyek pembangunan negara sebagai istri dan ibu yang mendukung suami serta menjaga moral keluarga. Dengan cara ini, Orde Baru menghilangkan potensi politik perempuan dan menjinakkan gerakan perempuan agar sesuai dengan nilai-nilai konservatif dan hierarki gender yang patriarkal. Melalui ibuisme negara, perempuan dilembagakan sebagai bagian dari strategi stabilitas nasional, bukan sebagai agen perubahan sosial sehingga mereduksi organisasi perempuan menjadi perpanjangan tangan negara, bukan sebagai wadah perjuangan kolektif yang independen.

Perbandingan antara Gerwani dan organisasi-

organisasi perempuan pada masa Orde Baru mencerminkan pergeseran radikal dalam cara negara memandang dan mengatur peran perempuan. Gerwani—yang aktif pada era 1950–1965—merupakan organisasi perempuan yang progresif dan politis, dengan agenda yang mencakup perjuangan kelas, kesetaraan gender, hak buruh perempuan, pendidikan, hingga reformasi agraria. Gerwani memosisikan perempuan sebagai agen perubahan sosial yang otonom dan berani menantang struktur kekuasaan patriarkal. Sebaliknya, organisasi perempuan pada masa Orde Baru, seperti Dharma Wanita dan PKK justru menempatkan perempuan dalam kerangka ibuisme negara, yaitu sebagai istri dan ibu yang bertugas mendukung suami serta menjaga keharmonisan rumah tangga demi stabilitas nasional. Jika Gerwani mendorong partisipasi perempuan dalam ruang politik dan sosial secara aktif dan kritis, maka organisasi-organisasi Orde Baru justru membatasi perempuan dalam peran-peran domestik dan simbolik, menjauhkan mereka dari ranah perjuangan struktural. Perbedaan mendasar ini menunjukkan bagaimana Orde Baru tidak hanya membungkam aktivisme perempuan, tetapi juga merekonstruksi ulang makna gerakan perempuan agar sejalan dengan kepentingan negara yang konservatif dan patriarkal.

Penutup

Sejak dibubarkannya Gerwani pasca-1965, organisasi perempuan di Indonesia mengalami kemunduran signifikan, baik dari segi visi politik maupun ruang gerak dalam masyarakat. Gerwani adalah salah satu organisasi perempuan revolusioner yang secara aktif terlibat dalam perjuangan dan advokasi kesetaraan gender, hak-hak buruh, serta gerakan anti-imperialisme. Dibandingkan dengan semangat transformasi substansial yang dibawa oleh Gerwani, organisasi perempuan setelahnya mengalami penyempitan visi dan peran yang secara tidak langsung memperkuat tatanan patriarki dan membatasi berbagai kemungkinan emansipasi. Di bawah pengaruh ibuisme negara, organisasi perempuan dibingkai sebagai pelengkap struktur keluarga patriarkal dengan peran utama perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pendukung suami. Terdapat pergeseran signifikan dalam orientasi organisasi perempuan di Indonesia pasca-Gerwani dari perjuangan politik yang menuntut kesetaraan substantif, menjadi kegiatan sosial yang apolitis dan normatif. Formalitas organisasi perempuan yang diimplementasikan melalui ibuisme negara menjadikan organisasi perempuan kehilangan

daya kritis dan kapabilitas perubahan karena dibatasi dalam kerangka ideologi patriarki yang dilembagakan.

Gerwani yang semula menjadi representasi perempuan progresif atas keterlibatan aktifnya dalam isu-isu sosial, politik, dan ekonomi, dihancurkan melalui kampanye sistematis yang tidak hanya memusnahkan organisasi tersebut secara fisik, tetapi juga menghancurkan citranya dalam ingatan kolektif bangsa. Kekosongan ini kemudian diisi oleh organisasi-organisasi yang dibentuk dan direstui negara, seperti Dharma Wanita dan PKK, dengan kecenderungan untuk berfungsi sebagai alat kontrol sosial ketimbang ruang perjuangan perempuan. Pelabelan yang ekstrim terhadap Gerwani dan pelembagaan terhadap konsep ibuisme negara menjadi kombinasi ampuh bagi pemerintahan Orde Baru untuk mengukuhkan subordinasi perempuan secara sistematis. Akibatnya, gerakan politik perempuan serta wacana feminis terbungkam dan mulai tersisihkan. Depolitisasi ini menghapus warisan aktivisme perempuan, meminggirkan masalah gender dalam kebijakan nasional, dan menetapkan kemajuan hak-hak perempuan selama beberapa dekade. Meskipun seiring era Reformasi berbagai gerakan perempuan independen kembali hadir dan berkembang, hal tersebut masih jauh dari apa yang pernah dicapai oleh Gerwani. Kehadirannya secara luas di berbagai kehidupan masyarakat di tahun 1950—1965 telah mengakar dengan signifikan. Tidak seperti banyak organisasi perempuan pada saat itu, Gerwani memosisikan perempuan tidak hanya sebagai pendukung gerakan yang dipimpin laki-laki, tetapi juga sebagai subjek politik aktif dengan agenda mereka sendiri. Gerakan yang revolusioner tidak hanya berhasil memobilisasi massa, tetapi juga menanggulangi berbagai isu-isu sosial secara langsung. Gerwani tidak hanya berhasil menanggulangi kekerasan langsung yang dihadapi perempuan di kala itu, tetapi juga berhasil mengakomodasi proses revolusi terhadap kekerasan yang terjadi, baik secara struktural maupun kultural. Hal ini adalah sesuatu yang masih sulit dilakukan oleh berbagai organisasi perempuan, bahkan di era Reformasi. Perkembangan terkait representasi perempuan memang meningkat, tetapi tidak banyak wacana feminis yang berhasil diakomodasi, apalagi diimplementasi. Keberhasilan Gerwani dalam membentuk jaringan akar rumput yang masif sulit untuk direplikasi karena ingatan kolektif pascakampanye sistematis Orde Baru masih melekat di masyarakat.

Antagonisasi Gerwani pasca-1965, ditambah dengan

implementasi ibuisme negara melalui pembentukan Dharma Wanita dan PKK menjadi bukti konkret bahwa ingatan kolektif terhadap organisasi perempuan di Indonesia sebelum reformasi dibentuk dan dipertahankan oleh rezim yang berkuasa. Dalam konteks ini, antagonisme dan ibuisme berjalan beriringan sebagai perangkat ideologis untuk membatasi agensi perempuan dan mereproduksi struktur patriarki yang sesuai dengan kepentingan rezim. Rezim membingkai peran perempuan sesuai dengan kepentingan hegemoni ideologi dan struktur kekuasaan maskulin yang sangat erat dengan militerisme. Alhasil, organisasi perempuan yang hadir pada masa itu diarahkan untuk mendukung struktur kekuasaan maskulin guna menghindari risiko perubahan *status quo*. Alih-alih mengadvokasi hak-hak perempuan, organisasi-organisasi tersebut justru berfungsi sebagai instrumen untuk memobilisasi perempuan dalam agenda pembangunan negara yang sering kali tidak mengakomodasi kebutuhan para perempuan secara berkelanjutan.

Meskipun pada era Reformasi berbagai organisasi dan gerakan perempuan banyak berkembang, belum ada organisasi maupun gerakan perempuan dengan skala dan sistematika yang menandingi Gerwani. Organisasi dan gerakan perempuan Indonesia mengalami dekadensi yang cukup dramatis. Upaya merebut kembali narasi atas sejarah perempuan dapat membentuk kesadaran atas potensi manipulasi dan integrasi koersif terhadap pergerakan perempuan. Oleh karena itu, pembahasan kembali terkait diskursus Gerwani dan jaringan akar rumputnya dapat menjadi landasan fundamental dalam pengembangan gerakan perempuan di masa yang akan datang. Diskursus ini juga dapat memberi gambaran terkait kerangka yang berhasil dibangun Gerwani melalui pendekatan interseksional dan inklusif. Nilai-nilai tersebut seyogianya dibawa di setiap agenda baru dalam berbagai pergerakan sehingga dapat memengaruhi aspek yang lebih luas, integral, serta berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2024. *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022 - Tabel Statistik*, diakses pada 10 Juni 2025, di <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGeyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html?year=2023>.

Djajadiningrat, M. 1992. "Ibuisim and Priyayization: Path to Power?"

dalam *Indonesian Women in Focus*, hlm. 43–51. Foris Publication: Dordrecht, The Netherlands.

Fanani, A. 2024. *How the Anti-communist Narrative Marginalized the Women's Movement In Indonesia – Conflict, Justice, Decolonization*, diakses pada 26 Mei 2025, di <https://cjdproject.web.nyu.edu.tw/2022/11/29/how-the-anti-communist-narrative-marginalized-the-womens-movement-in-indonesia/>.

George, A. & Bennett, A. 2005. *Case Studies and Theory Development in The Social Sciences*. MIT Press: Cambridge.

Hyunanda et al. 2021. "State Ibuism and Women's Empowerment in Indonesia: Governmentality and Political Subjectification of Chinese Benteng Women". *Sustainability* 13(6), hlm. 1–18.

International People's Tribunal. 2016. *Final Report of The IPT 65: Findings and Documents of The International People's Tribunal on Crimes Against Humanity Indonesia 1965*, diakses pada 12 Juli 2025, di https://www.concernedhistorians.org/content_files/file/le/681.pdf.

Kim, Ye-kyoum. 2017. "Institutionalized Images of Womanhood under the Orde Baru in Indonesia". *The Southeast Asian Review* 27 (2), hlm. 119–153.

Komnas Perempuan. 2007. Laporan Pemantauan HAM Perempuan: Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender – Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965, diakses pada 12 Juli 2025, di http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/ID/Komnas_Perempuan_UPR_IDN_S13_2012_KomnasPerempuan_Annex8_E.pdf.

Lestariningsih, A. & Soekarba, S. 2019. "Absence of Women's Party in the New Order Era: Case Study of Indonesian Women Movement". *International Review of Humanities Studies* 4(1), hlm. 420–434.

Mamdani, M. 2009. "The Politics of Naming: Genocide, Civil War, Insurgency", dalam *Darfur and the Crisis of Governance in Sudan: A Critical Reader*, hlm. 145–153. Cornell University Press: New York.

Margret, A. 2019. "Two Decades of Indonesia's Democracy and the Fading of Feminist Agenda". *Jurnal Perempuan* 24(2), hlm. 89–100.

Perdana, A. & Wildianti, D. 2019. "Women Political Movements After 20 Years of Reformasi in Indonesia". *Jurnal Perempuan* 24(1), hlm. 43–43.

Pohan, M. 2020. "Politik Seksual terhadap Organisasi Perempuan Pasca Kemerdekaan di Indonesia". *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 7(1), hlm. 22–30.

Pohlman, A. 2011. "Women and Nationalism in Indonesia". *Historia Jurnal Pendidikan dan Peneliti Sejarah* 12(1), hlm. 13–22.

Pratiwi, A. 2019. "The Policies, Practices, and Politics of Women Representation in Political Parties: A Case Study of Women Members of Parliament in Regency/City-level Legislative Council Period 2014–2019". *Jurnal Perempuan* 24(2), hlm. 151–163.

Rahmanudin, D. 2022. "Gerwani Mazhab Politik Islam Era Soekarno". *Jurnal Kewarganegaraan* 6(2).

Suryakusuma, J. 2011. *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Komunitas Bambu: Jakarta.

Wieringa, S. 1993. "Two Indonesian Women's Organizations: Gerwani and the PKK". *Bulletin of Concerned Asian Scholars* 25(2), hlm. 17–30.

Wieringa, S. 1999. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Garba Budaya dan Kalyanamitra: Jakarta.

Wieringa, S. 2001. "The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism". *Journal of Women's History* 15(1), hlm. 70–91.

Wieringa, S. 2002. *Sexual Politics in Indonesia*. Palgrave Macmillan: London.

Wieringa, S. 2011. "Sexual Slander and the 1965/66 Mass Killings in Indonesia: Political and Methodological Considerations". *Journal of Contemporary Asia* 41(4), hlm. 544–565.